



HARIAN LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

Edisi Senin, 10 April 2023

KORAN DIGITAL
LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat
12 Halaman
download edisi digital
www.lenteratoday.com
**VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021**

www.lenteratoday.com @lenteratoday lentera.tv @lenteratoday Lentera TV M @lenteratoday

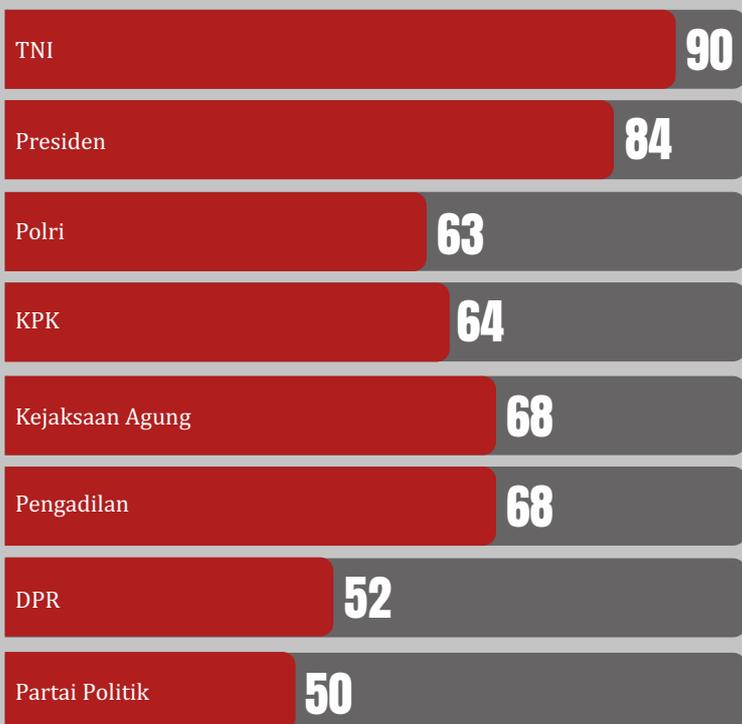
FIRLI DI PUSARAN KONTROVERSI (LAGI)

Beredar Rekaman Suara Saat Pegawai KPK Walkout

Kisruh di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengemuka usai Brigjen Endar Priantoro dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan. Ketua KPK Firli Bahuri lagi-lagi berada di pusaran kontroversi. Terbaru, beredar rekaman pegawai KPK walkout saat rapat protes kepada Firli terkait penghentian Endar. Dalam rekaman yang dibagikan akun Twitter Rakyat Jelata @dimdim0783 pada Minggu (9/4/2023), diduga berisi suara Ketua KPK Firli Bahuri dengan pria bernama Wicklief yang merupakan Kepala Satgas Penyelidikan KPK dari Polri. Ketika para pegawai meninggalkan rapat, Firli secara tegas menyatakan bahwa keputusan pengembalian Endar bukan urusan pribadi. Sebelumnya, Firli juga dilaporkan Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) karena diduga membocorkan surat penyelidikan kasus tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian ESDM. Tugas berat bagi Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

(Baca Hal 11)

TREN KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA MENURUT LSI BULAN APRIL 2023 (%)



**Parlement (Hal.3)
ICW Adukan
55 Anggota DPR
Tak Patuh LHKPN
ke MKD**

Polemik Petugas Pajak yang Datangi Soimah Sri Mulyani Buka Suara, Ditjen Pajak Ungkap 3 'Pembelaan'

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut buka suara terhadap viralnya cerita artis Soimah atas perlakuan petugas pajak yang sempat ia alami. Cerita itu ia sampaikan dalam Podcast Blakasuta di Youtube [mojokdotco bersama Butet Kartaredjasa](#).

"Saya mendapat kiriman video dari Mas @masbutet yang mengadu ke saya mengenai keluhan dan kekesalan Bu @showimah akibat perlakuan 'aparatur pajak'," kata Sri Mulyani melalui akun instagramnya, Minggu (9/4/2023).

Sri Mulyani mengatakan, setelah menyaksikan video yang viral itu, ia telah meminta tim dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meneliti permasalahan yang dialami Soimah. Lalu ia pun menyampaikan penjelasan dalam bentuk video yang dinarasikan bawahannya. "Saya meminta tim @ditjenpajakri melakukan penelitian masalah yang dialami Bu Soimah. Berikut penjelasan secara lengkap, detail, dan akurat dari rekan-rekan @ditjenpajakri. Semoga memberikan titik terang bagi masyarakat," ujar Sri Mulyani.

Secara garis besar, isi yang disampaikan tim dari Ditjen Pajak itu serupa dengan yang telah disampaikan Juru Bicara Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo kemarin. Mulai dari penjelasan tidak adanya debt collector yang digunakan Ditjen Pajak, hingga tak adanya pegawai pajak yang bertemu dengan Soimah.

"Kami akan terus melakukan perbaikan pelayanan. Terima kasih atas masukan dan kritikan yang konstruktif. Untuk Indonesia yang lebih baik!" Ujar Sri Mulyani.

Penjelasan pertama terkait kasus Soimah ini mengenai kisah pada 2015 ketika Soimah membeli rumah. Mengikuti kesaksiannya di Notaris, patut diduga yang berinteraksi adalah petugas BPN dan Pemda, yang berurusan dengan balik nama dan pajak-pajak terkait BPHTB yang merupakan domain Pemda, bukan petugas pajak Ditjen Pajak.

Dalam penjelasan video itu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), termasuk KPP Bantul biasanya hanya memvalidasi. Jika pun ada kegiatan lapangan, itu adalah kegiatan rutin untuk memastikan nilai yang dipakai telah sesuai dengan ketentuan, yaitu harga pasar yang mencerminkan keadaan

yang sebenarnya.

Kedua, tentang kedatangan petugas pajak yang membawa debt collector, masuk rumah melakukan pengukuran pendopo, termasuk pengecekan detail bangunan. Itu adalah kegiatan normal yang didasarkan pada surat tugas yang jelas.

Memang membangun rumah tanpa kontraktor dengan luas di atas 200 m² terutang PPN 2% dari total pengeluaran. UU mengatur ini justru untuk memenuhi rasa keadilan dengan konstruksi yang terutang PPN. Petugas pajak bahkan melibatkan penilai profesional agar tak semena-mena.

Dalam penjelasan Prastowo kemarin, sebagaimana ada dalam video instagram Sri Mulyani juga, dari hasil pemeriksaan petugas pajak, nilai bangunan yang Soimah buat itu malah ditaksir Rp 4,7 miliar, bukan Rp 50 miliar seperti diklaim Soimah. Dalam laporannya sendiri Soimah menyatakan pendopo itu nilainya Rp 5 miliar.

"Penting dicatat, kesimpulan dan rekomendasi petugas pajak tersebut bahkan belum dilakukan tindak lanjut. Artinya PPN terutang 2% dari Rp 4,7 miliar itu sama sekali belum ditagihkan," tuturnya.

Adapun terkait pembahasan adanya debt collector yang dibawa petugas pajak saat mendatangi Soimah, menurut Prastowo, sebetulnya Kantor Pajak menurut undang-undang sudah punya penagih utang sendiri, yaitu Juru Sita Pajak Negara

(JSPN).

"Mereka bekerja dibekali surat tugas dan menjalankan perintah jelas: ada utang pajak yang tertunggak. Soimah sendiri tidak pernah diperiksa kantor pajak dan tercatat tak ada utang pajak, lalu buat apa mendatangi sambil membawa debt collector?" kata Prastowo.

Bagi JSPN, tak sulit menagih tunggakan pajak tanpa harus marah-marah. Ia bisa menerbitkan Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, memblokir rekening, lalu melelang aset atau memindahkan saldo rekening ke kas negara.

"Kesaksian semua petugas pajak yang berinteraksi, mereka tak pernah bertemu Soimah. Hanya keluarga atau penjaga rumah. Terakhir dengan konsultan pajak. Patut diduga ini bersumber dari cerita pihak lain, yang merasa gentar dan gemetar," ujar Prastowo.

Belum Lapor SPT

Adapun permasalahan ketiga, terkait cerita Soimah saat dihubungi petugas pajak yang seolah dengan cara tidak manusiawi mengejar untuk segera melaporkan SPT di akhir Maret 2023 ini. Prastowo mengatakan sudah mendengarkan rekaman percakapan Soimah dan juga chat WA dengan petugas pajak.

"Duh...saya malah kagum dengan kesabaran dan kesantunan pegawai KPP Bantul ini. Meski punya kewenangan, ia tak sembarangan menggunakannya. Ia hanya mengingatkan bahkan menawarkan bantuan jika Soimah

kesulitan," tuturnya.

Ternyata perlakuan itu dianggap memperlakukan Soimah seperti maling, bajingan, atau koruptor. Hingga detik ini pun meski Soimah terlambat menyampaikan SPT, KPP menurut Prastowo dan video keterangan petugas Ditjen Pajak yang dibagikan Sri Mulyani menyatakan tidak mengirimkan teguran resmi, melainkan persuasi ke Soimah.

"Saya sudah menghubungi Mas Butet yang menyediakan diri menjadi penengah yang baik. Beliau mengajak pihak KPP dan Soimah duduk bareng, ngobrol hati ke hati. Tak perlu masing-masing merasa yang (paling) benar," ucap Prastowo.

Untuk diketahui, Soimah menceritakan pengalamannya tersebut kepada budayawan Butet Kartaredjasa dan Puthut EA petinggi media Mojok.co, dalam sebuah tayangan sinar bertajuk 'Blakasuta'. Dia menceritakan, bagaimana pihaknya diperlakukan tidak baik oleh 'debt collector' pajak untuk menagih pajak penghasilannya. Kejadian itu terjadi 2015 silam.

Saat kedatangan oknum pegawai pajak itu, Soimah mengaku masih ada di Jakarta, sehingga hanya orang-orang di rumah yang mengetahuinya. "Tahun 2015 datang ke rumah orang pajak, buka pagar tanpa kulonuwun (permisi), tiba-tiba di depan pintu yang seakan-akan saya tuh mau melarikan diri. Yang pokoknya saya dicurigai," tutur Soimah, dikutip dari tayangan Youtube bertajuk 'Blakasuta'. (wid,rls,mer,rep/dya)



Pendopo Tulungo di Yogyakarta miliki Soimah yang ditaksir petugas pajak bernilai Rp 4,7 M. (Insert) Artis Soimah saat menceritakan pengalamannya dikejar pajak kepada budayawan Butet Kartaredjasa di kanal Youtube. (Foto: IGpendopotulungo/tangkapan layar)

ICW Adukan 55 Anggota DPR Tak Patuh LHKPN ke MKD



Demo terhadap DPR RI terus mengalir, terbaru mengenai Perppu Cipta Kerja dengan salah satu poin seruan tidak percaya terhadap kinerja para wakil rakyat. (dok)

JAKARTA - Kepatuhan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) pejabat dan wakil rakyat menjadi sorotan saat ini. Ironisnya, data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut puluhan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR tidak patuh. Rencananya, ICW akan melaporkan mereka ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

"Kami akan melaporkan antara besok atau Selasa ya. Besok tuh Endar masih ramai ya di KPK. Jadi kayaknya lusa, Selasa," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Minggu (9/4/2023).

Kurnia mengatakan sebanyak 55 dari 86 pimpinan AKD DPR akan dilaporkan ke MKD DPR, Selasa (11/4/2023). Diketahui, angka 55 ini didapat ICW berdasarkan hasil kajian terbarunya terkait kepatuhan pimpinan AKD DPR dalam melaporkan LHKPN. "55 orang itu semua (akan dilaporkan ke MKD DPR)," katanya.

Lebih lanjut Kurnia mengatakan pihaknya akan membawa sejumlah bukti dalam pelaporan itu. Bukti yang disertakan, kata dia, antara lain dokumen dari laman resmi LHKPN. "Kita kumpulkan bukti-bukti bahwa mereka tidak patuh melaporkan LHKPN, baik secara periodik atau berkala dan ketepatan waktu. Kalau ketepatan waktu ini, jika mereka melaporkan di atas 31 Maret kami kategorikan tidak patuh. Dokumen yang kami bawa adalah bukti dari website LHKPN yang sudah kami kumpulkan," kata dia.

Kurnia lalu memerinci 55 orang yang dikategorikan tidak patuh melaporkan LHKPN. Dia miris mayoritas pimpinan DPR justru masuk ke kategori tidak patuh. "Ini data yang tidak patuh melaporkan LHKPN. Tentu kita miris ternyata pimpinan DPR dari 5 orang, 4 orangnya tidak patuh

melaporkan, baik terlambat maupun tidak berkala. Sementara pimpinan komisi sebanyak 37 orang, pimpinan Baleg 2 orang, pimpinan Banggar 2 orang, pimpinan BURT 3 orang, pimpinan BKSAP 2 orang, pimpinan BAKN 2 orang, pimpinan MKD 3 orang," katanya.

Kurnia juga memaparkan pemetaan ketidakpatuhan para pimpinan AKD berdasarkan asal partai politiknya. Dia menuturkan mayoritasnya berasal dari PDI Perjuangan (PDIP). "Bagaimana pemetaan dari parpol yang tidak patuh melaporkan LHKPN wakil-wakilnya di pimpinan AKD. Ternyata parpol paling banyak pimpinan AKD-nya tidak patuh adalah PDIP, diikuti Golkar. Jumlahnya 11 orang, PKB 10 orang, Gerindra 6 orang, NasDem 5 orang, PAN 5 orang, Demokrat 3 orang, PPP 2 orang, PKS 2 orang," ujar Kurnia.

Sahroni: Mungkin Lupa atau Tak Sempat

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengucapkan terima kasih kepada ICW yang mengumumkan bahwa adanya puluhan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR yang tidak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN). Sahroni mengatakan para anggota DPR memang harus diingatkan.

"Terima kasih ICW sudah konsisten memperhatikan secara detil hal-hal yang berkaitan dengan korupsi dan potensi-potensinya. Kami di Komisi III (DPR) sangat menyambut baik laporan ini," kata Sahroni kepada wartawan, Minggu (9/4/2023).

Sahroni mengatakan memang lebih baik para anggota DPR diingatkan untuk rutin melaporkan LHKPN. Dia menduga mereka yang belum melaporkan kemungkinan lupa atau tidak sempat. "Baiknya memang

diingatkan, karena siapa tahu dewan yang bersangkutan lupa atau tidak sempat. Atau stafnya teledor. Banyak kemungkinan," ucapnya.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menduga banyak anggota dewan pusat dan daerah yang

belum melaporkan LHKPN karena beberapa sebab. Salah satunya, banyak yang merasa tidak ada perubahan substansial pada harta kekayaan para anggota dewan tersebut.

"Karena merasa tidak ada perubahan substansial dalam harta kekayaan mereka," ujar Arsul.

Wakil Ketua MPR itu menilai kondisi tersebut membuat mereka belum memperbaharui LHKPN. Sehingga, belum menunaikan kewajiban hingga batas waktu yang ditentukan.

"Ya belum itu kan update, bukan LHKPN pertama. Biasanya suka ada yang telat update-nya," ujar dia.

Sebanyak 10.685 pejabat tidak menyerahkan LHKPN yang berakhir pada 31 Maret 2023. Pihak yang paling banyak tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu anggota DPR dan DPRD.

Penyampaian LHKPN merupakan kewajiban penyelenggara negara. Hal itu merupakan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (wid,rls,ist,kum/dya) tertulisnya. (wid,rls,ist,ant/dya)

10 PEJABAT PALING KAYA DI INDONESIA



Sandiaga Uno (menparekraf)

Rp 10.617.085.468.830.



Dato Sri Tahir (watimpres Periode 2019-2024 Dan Pendiri Mayapada Group)

Rp 9.253.809.327.742.



Prabowo Subianto (menteri Pertahanan)

Rp 2.032.478.722.760.



Muhamad Mardiono (watimpres 2019-2024)

Rp 1.276.379.450.733.



Nadiem Anwar Makarim (Mendikbudristek)

Rp 1.175.047.616.596.



Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Kemaritiman dan Investasi)

Rp 716.314.993.267.



Benny Laos Benny (Bupati Kabupaten Pulau Morotai)

Rp 507.238.414.993.



Wiranto (Watimpres)

Rp 472.829.895.231.



Muhidin (Wakil Gubernur Kalimantan Selatan)

Rp 438.860.881.379.



Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian)

Rp 425.600.875.203.



Prabowo Ungguli Ganjar di Survei LSI, Tergeser di Jawa Timur



Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berjalan ke luar Masjid Raya Sheikh Zayed Solo usai mengikuti salat Jumat, Jumat (7/4/2023). (Dok: Istimewa)

JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mulai menggeser dominasi nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dari wilayah Jawa Timur. Menurut survei terbaru yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), mayoritas suara masyarakat Jawa Timur kini memilih Menteri Pertahanan tersebut.

"Dari data ini mulai mengindikasikan pergeseran dari tadinya Ganjar yang cukup tinggi, unggul, sekarang mulai diambil alih oleh Prabowo. Meskipun unggulnya 38,2 persen, belum dominan," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam pemaparan hasil surveinya, Minggu (9/4/2023).

Ganjar Pranowo yang sebelumnya selalu menempati urutan pertama di wilayah tersebut, kini hanya mendapatkan 30 persen suara di Jawa Timur. Sementara Anies Baswedan mendapatkan 14,2 persen suara.

Untuk wilayah lain, Djayadi menyebut Prabowo Subianto umumnya unggul tipis di luar Pulau Jawa. Seperti di Pulau Sumatra, Prabowo mendapatkan 31,6 persen, Anies 26,8 persen, dan Ganjar 20,4 persen. Di Bali dan Nusa Tenggara, Prabowo mendapatkan 32,1 persen, Anies 27,1 persen, dan Ganjar 26,1 persen.

"Lalu Prabowo di Kalimantan 33,4

persen, Sulawesi 45,3 persen, Maluku Papua 42,9 persen. Ganjar Pranowo masih unggul cukup dominan di Jateng dan DIY. Anies Baswedan cenderung unggul di Banten dan DKI," kata Djayadi.

Khusus untuk di Jawa Barat, Djayadi menyebut

Prabowo dan Anies bersaing ketat hingga hampir seri. Di sana Anies mendapatkan 29,9 persen dan Prabowo 30,8 persen.

Survei yang digelar oleh LSI ini menargetkan WNI berusia 17 tahun ke atas dan memiliki nomor telepon. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). Dengan teknik ini, sebanyak 1.229 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.

Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. Margin of error survei diperkirakan 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.

Prabowo kini tengah sibuk berkomunikasi dengan partai politik lain setelah Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan partai pendukungnya, mengusulkan adanya koalisi besar di Pilpres 2024. Koalisi besar yang dimaksud adalah terdiri dari partai pendukung Jokowi minus NasDem.

Terakhir dia bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas. Dalam pertemuan itu, Prabowo mengusulkan jalan tengah dalam menghadapi Pemilu 2024. Dia

mengatakan semua harus menang dalam Pemilu tersebut.

Terpisah, Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade menyebut hal ini kabar yang menggembirakan. "Alhamdulillah, pak Prabowo unggul pak Ganjar. Dari simulasi tiga calon, Pak Prabowo mendapatkan persentase mencapai 30,3 persen. Sementara Ganjar hanya 26,9 persen dan Anies Baswedan 25,3 persen. Tentu ini hasil yang menggembirakan bagi Partai Gerindra," kata Andre dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/4/2023).

Anggota DPR RI asal Sumbar ini juga bersyukur elektabilitas Gerindra berada di posisi kedua setelah PDIP. Dia berharap elektabilitas partainya ini terus meningkat jelang pemilu.

"Alhamdulillah Partai Gerindra kokoh di nomor dua. Harapan kami ini akan terus meningkat," kata Ketua DPD Gerindra Sumbar ini. Andre mengatakan survei ini hasil dari evaluasi pimpinan Gerindra terhadap kinerja partai. Dia berharap semua kader menjadikan survei ini sebagai penyemangat.

Elektabilitas PDIP Turun

Untuk survei partai politik PDIP masih berada di posisi teratas disusul Gerindra dan Partai Golkar. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan membeberkan jika dibanding survei sebelumnya pada Februari PDIP, Golkar, dan PKB mengalami penurunan saat ini, meski tidak signifikan. Sementara PKS terlihat menguat.

"Dibanding temuan pada Februari lalu, PDIP, Golkar, dan PKB ada indikasi mengalami penurunan meski tidak besar. PKS ada kecenderungan menguat, sementara partai lain dinamikanya lebih rendah," katanya.

Dalam survei ini, posisi teratas diisi oleh PDIP dengan suara 17,7% namun mengalami penurunan dari sebelumnya 19,3%. Golkar saat ini di posisi ketiga dengan suara 7,8% sebelumnya 10,9%, kemudian PKB di posisi kelima kini 4,4% sebelumnya

6,9%. Sementara Gerindra kini berada di posisi kedua dengan suara 12,8% mengalami kenaikan dari survei sebelumnya 11,1%. Sementara PKS di posisi keempat dengan suara 7,6% dari sebelumnya 5,4%.

Sementara Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku dibuat kaget saat melihat hasil survei tingkat elektabilitas Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo. Bahlil pun lalu menyinggung pengaruh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Nah terkait dengan itu saya kaget ini Pak Prabowo bisa menyalip Pak Ganjar ini ini saya nggak tahu ini pengaruh Prabowo ikut Jokowi terus atau pengaruh apa atau karena mungkin pengaruh bola," kata Bahlil di acara rilis hasil survei LSI, Minggu (9/4/2023).

Bahlil mengatakan akhir-akhir ini sering melihat Prabowo ikut kunjungan kerja bersama Jokowi. Bahkan, kata Bahlil, Prabowo mengatakan Jokowi adalah guru politiknya. "Nah ini mungkin pak Djayadi kalau bisa materinya harus didetailkan juga jgn bola aja karena akhir-akhir ini saya melihat Pak Prabowo ikut Pak Jokowi terus sampai-sampai Pak Prabowo ini mengatakan Pak Jokowi itu adalah guru politiknya," kata Bahlil.

Bahlil mengatakan kenaikan elektabilitas Prabowo semestinya harus dirincikan detail. Sementara itu terkait elektabilitas Ganjar yang menurun, Bahlil melihat hal itu karena faktor pernyataan Ganjar soal Piala Dunia U-20.

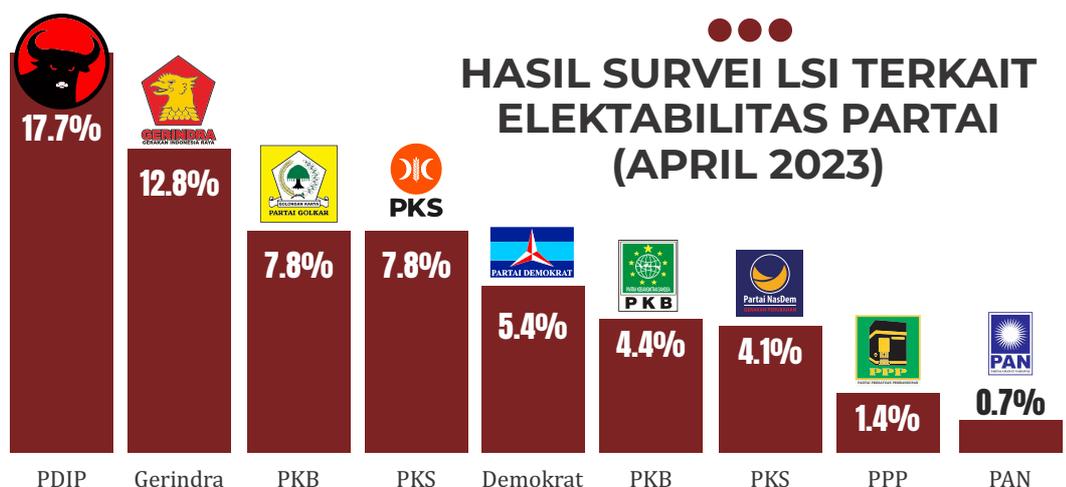
"Mungkin ada nggak kira-kira pengaruh statement Pak Prabowo yang menyatakan Pak Jokowi guru politik yang berdampak pada kenaikan 3% itu. Nama nyangkut dengan itu saya pikir masih dalam normal, semua kita tahu kalau pas Pak Ganjar kan mungkin karena kena sedikit di bola, tapi saya pikir wajar aja rakyat bingung, ke depan bisa kita perbaiki semuanya lah saya pikir dan semuanya, saya pikir masih punya peluang masih punya peluang yang baik semuanya," kata Bahlil. (wid,rls,ant,kum/dya)

PILIHAN PRESIDEN (SIMULASI 3 NAMA)

Lembaga Survei Indonesia (LSI)



HASIL SURVEI LSI TERKAIT ELEKTABILITAS PARTAI (APRIL 2023)



Disbudpar Ajak Masyarakat Habiskan Liburan Lebaran di Jatim



Kadisbudpar Jatim, Hudiyono

SURABAYA-Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur (Disbudpar Jatim) mengajak masyarakat menghabiskan masa liburan Lebaran 2023 dengan mengunjungi banyak objek wisata unggulan di Jatim. Diantaranya, kawasan Malang Raya, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) kawasan Banyuwangi, Jember, Situbondo, Pacitan, dan Tulungagung.

Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub RI, potensi pergerakan nasional mudik tahun 2023 ini bakal ada 123,8 juta orang yang akan pulang ke kampung halaman. Jumlah tersebut jauh melampaui jumlah pemudik tahun 2022 sebanyak 85 juta orang. Bahkan tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Tingginya jumlah pemudik secara nasional itu menjadi tak lepas dari

kebijakan pemerintah yang mengizinkan mudik pasca status pandemi diturunkan menjadi endemi. Tercatat, Jawa Timur menjadi provinsi tertinggi sebagai daerah asal perjalanan mudik 2023 mencapai 17,1 persen. Melebihi Jawa Tengah 15,1 persen, Jabodetabek 14,8 persen dan Jawa Barat (Non Bodebek) 12,1 persen. Jawa Timur juga menjadi daerah tujuan perjalanan tertinggi kedua setelah Jawa Tengah 26,45 persen, yakni 19,87 persen. Disusul Jawa Barat (Non Bodebek) 16,73 persen dan Jabodetabek 6,52 persen.

Sebelumnya, Gubernur Khofifah Indar Parawansa memastikan, Jatim siap menghadapi masa mudik lebaran tahun 2023. Pihaknya juga telah melakukan persiapan guna memastikan masyarakat bisa mudik dengan selamat, aman, nyaman dan bahagia.

"Untuk itu kami memastikan, angkutan umum tersedia dalam jumlah yang cukup, melakukan antisipasi dan juga rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan di arteri maupun di exit tol, melakukan langkah-langkah antisipasi di titik-titik destinasi wisata, memastikan kemandapan jalan, dan juga menyediakan layanan mudik gratis bagi warga Jatim," ungkapnya.

Sementara, Kadisbudpar Jatim, Hudiyono di kantornya Surabaya, Kamis (6/4/2023) menuturkan, mudik Lebaran menjadi tradisi dan budaya yang sangat dinantikan jutaan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur. "Mudik menjadi forum silaturahmi dengan keluarga, khususnya para perantau yang nantinya kembali ke kampung halaman di Jawa Timur. Untuk itu, kami bekerjasama dengan banyak pihak untuk bisa menyambut momen mudik Lebaran sambil liburan di Jatim aja," ungkapnya.

Ia menyebutkan, Lebaran sambil liburan di Jawa Timur sangat tepat karena ada 1.368 daya tarik wisata, yakni 475 wisata alam, 550 wisata buatan, dan 343 wisata budaya. Jawa Timur juga memiliki potensi destinasi 596 desa wisata yang siap menyambut pemudik untuk berlibur. Ditambah fasilitas sarana sebanyak 1.576 hotel, 7.889 rumah makan atau resto, 1.743 homestay dan 1.792 biro perjalanan wisata.

Berdasarkan data Disbudpar Jatim pada 2022, terdapat top 10 kunjungan wisatawan saat libur Lebaran. Diantaranya Telaga Sarangan Magetan, Kebun Binatang Surabaya, Pantai Balekambang Malang, Go Fun Bojonegoro, Pantai Boom Banyuwangi, Pantai Klayar Pacitan, Taman Safari Pasuruan, Pantai Gemah Tulungagung, Pantai Watu Ulo Jember dan Jatim Park II Batu. Selain itu, masih banyak ratusan destinasi yang bisa menjadi tujuan wisata di musim libur Lebaran nanti.

Guna memastikan, pemudik Lebaran yang liburan di Jatim agar merasa aman dan nyaman, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan lintas instansi. "Sudah dilakukan pemetaan jalur rawan kemacetan oleh Ditlantas Polda Jatim. Titik rawan bencana sudah dirilis BPBD Jatim. Semua sudah dilakukan upaya preventif hingga mitigasi," tuturnya.

Selain itu, pengelola wisata di Jawa Timur juga telah diberikan imbauan oleh Sekdaproprov Jawa Timur melalui surat No 556.2/14109/118.9/2023. Dalam surat imbauan tersebut, pihak penanggungjawab usaha pariwisata diminta untuk mengawasi, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan.

"Bismillah, semoga proses perjalanan mudik Lebaran tahun ini berjalan lancar dan aman. Sambil silaturahmi bersama keluarga di kampung halaman bisa sambil liburan. Tentunya kalau mau healing yang menyenangkan, ya di Jatim aja," pungkasnya.(ADV)



Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menjadi salah satu andalan objek wisata di Jatim untuk menarik wisatawan. (Dok ist)

Siasat Bupati Meranti Olah Duit Korupsi Terungkap

KPK MENETAPKAN TIGA ORANG SEBAGAI TERSANGKA, YAKNI:

1. BUPATI KEPULAUAN MERANTI MUHAMMAD ADIL

Dijerat dengan pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adil juga disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

2. KEPALA BPKAD PEMKAB KEPULAUAN MERANTI FITRIA NENGSIH

Dijerat dengan pasal Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. PEMERIKSA MUDA BPK PERWAKILAN RIAU M FAHMI ARESSA

Dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2021-2024, Muhammad Adil mengenakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT), di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/4/2023) malam.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya membeberkan siasat Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil dalam mengeruk duit korupsinya. Dia diduga meminta setoran dari para Kepala Dinas (Kadis) hingga diduga menerima suap dari travel umrah.

Wakil Ketua KPK Alexander

Marwata mengatakan Adil diduga memerintahkan para kepala dinas di Pemkab Kepulauan Meranti untuk memberi setoran kepadanya. Setoran itu berasal dari uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GU) masing-masing dinas.

"Sumber anggarannya dari pemotongan uang persediaan (UP)

dan ganti uang persediaan (GU) masing-masing SKPD yang kemudian dikondisikan seolah-olah adalah utang pada MA (M Adil)," kata Alexander dalam konferensi pers, seperti dikutip Minggu (9/4/2023).

Dia mengatakan besar potongan itu antara 5 hingga 10 persen. Setoran UP dan GU itu diserahkan kepada Fitria dalam bentuk uang tunai. "FN yang menjabat Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti sekaligus adalah orang kepercayaan MA," ujarnya.

Alexander mengatakan uang itu dikumpulkan untuk keperluan Adil. Salah satunya ialah dana operasional safari politik untuk maju Pilgubri. "Setelah terkumpul, uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan MA di antaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonan MA untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Riau di tahun 2024," ujarnya.

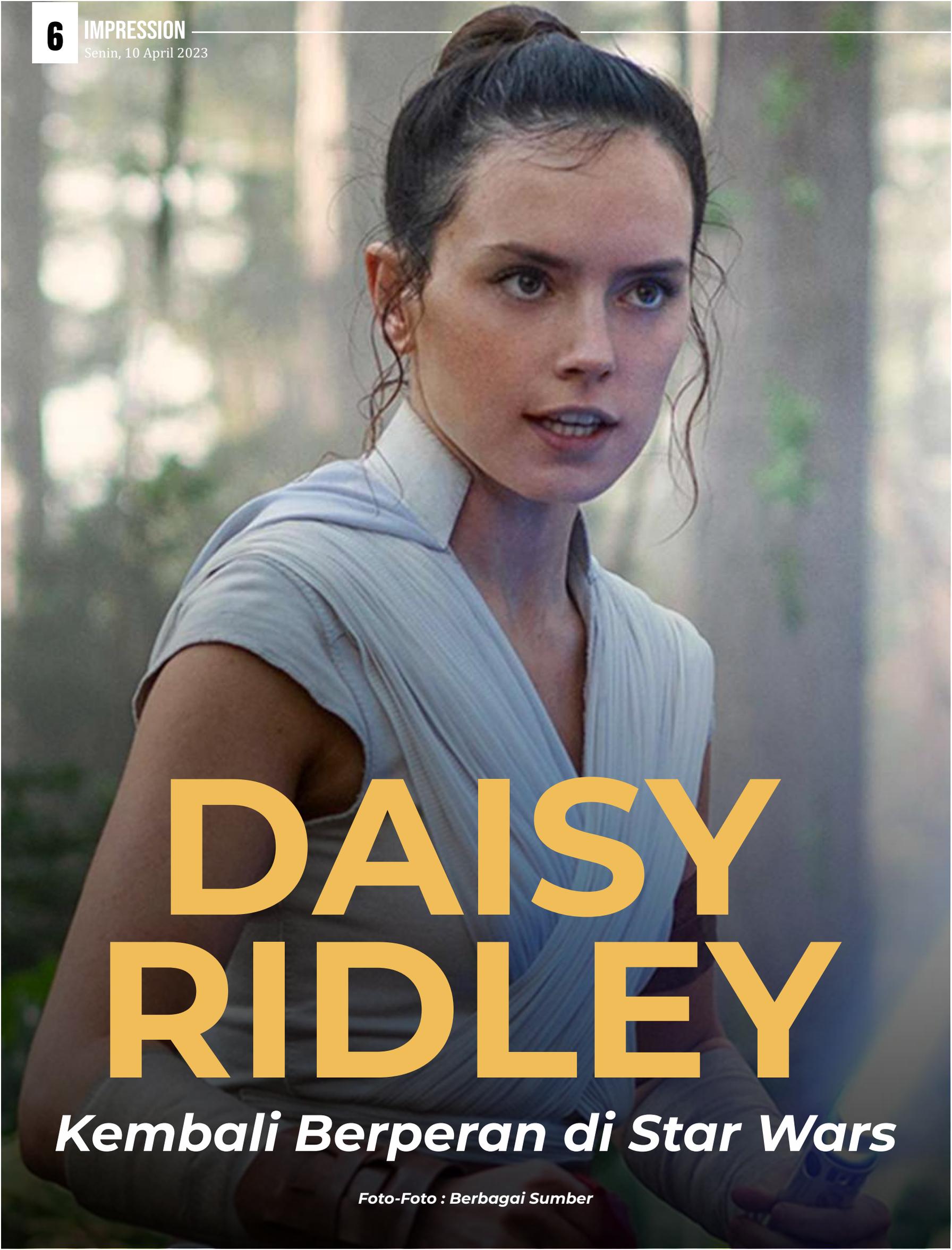
Alexander tak menjelaskan detail berapa duit yang terkumpul. Namun,

dia mengatakan Adil diduga telah menerima Rp 26,1 miliar.

"Sebagai bukti awal dugaan korupsi yang dilakukan MA menerima uang sejumlah sekitar Rp 26,1 miliar dari berbagai pihak dan tentunya hal ini akan ditindaklanjuti dan didalami lebih detail oleh Tim Penyidik," ujarnya.

Adil juga diduga menerima suap dari travel umrah. Suap itu diduga diberikan karena Adil telah memenangkan travel umrah PT Tanur Muthmainnah untuk program umrah para takmir masjid di Kepulauan Meranti.

"Sekitar bulan Desember 2022, MA menerima uang sejumlah sekitar Rp 1,4 miliar dari PT TM (Tanur Muthmainnah) melalui FN yang bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umrah karena memenangkan PT TM untuk proyek pemberangkatan umrah bagi para Takmir Masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Alexander. (wid,rls,kum/dya)



DAISY RIDLEY

Kembali Berperan di Star Wars

Foto-Foto : Berbagai Sumber



Ridley.

Paman buyutnya adalah Arnold Ridley, aktor Inggris, penulis naskah drama, dan diangkat menjadi Pejabat Ordo Kerajaan Inggris (OBE), yang terkenal karena perannya dalam drama "The Ghost Train", dan perannya sebagai "Prajurit Godfrey" di sitkom Inggris, "Dad's Army" (1968).

Daisy Ridley memulai karirnya dengan peran-peran kecil di beberapa film pendek dan seri televisi.

Pada tahun 2013, ia memerankan Jessie dalam serial televisi berjudul Younger.

Selain itu, pada tahun yang sama ia juga ambil bagian dalam serial Toast of London.

Pada 2014 ia juga ambil peran dalam Silent Witness dan Mr. Selfridge.

Pecah telur dalam karirnya adalah pada tahun 2015.

Saat Daisy berhasil terpilih untuk menjadi salah satu pemeran utama dalam film franchise besar Star Wars: The Force Awakens.

Dari perannya tersebut ia menggebrak dunia perfilman, seakan berasal dari antah-berantah, Ridley berhasil menyuguhkan penonton dengan karakter Rey yang ia mainkan.

Kemudian pada tahun 2017, Daisy Ridley membintangi film Murder on the Orient Express hasil adaptasi novel Agatha Christie.

Ia beradu akting dengan bintang sekaliber Johnny Depp dan Michelle Pfeiffer.

Film tersebut membawa nama Daisy Ridley semakin melambung menjadi bintang kelas A Hollywood (berbagai sumber)

baru.

Proyek itu menandai beberapa tonggak penting untuk waralaba film tersebut karena Obaid-Chinoy menjadi wanita pertama dan orang kulit berwarna pertama yang menyutradarai film "Star Wars".

Sineas asal Pakistan tersebut dikenal telah memenangkan dua Academy Awards untuk film dokumenter pendek, yaitu pada 2011 untuk "Saving Face" dan pada 2015 untuk "A Girl in the River: The Price of Forgiveness".

Terbaru, dia dikenal karena menyutradarai dua episode pada serial "Ms. Marvel" untuk Disney+.

Keputusan Lucasfilm dengan menggandeng Steven Knight untuk terlibat dalam seri populer ini terbilang bagus karena pada Februari 2023, Lucasfilm langsung kehilangan dua penulis naskah yakni Damon Lindelof dan Britt-Gibson yang sejak awal terlibat dalam "Rise of Skywalker".

Bersamaan dengan film Obaid-Chinoy, Kennedy juga mengumumkan bahwa James Mangold dan Dave Filoni (produser eksekutif serial Disney+ "The Mandalorian" dan "Ahsoka") akan menyutradarai film lainnya dari seri "Star Wars".

Taika Waititi ("Thor: Ragnarok") juga sedang mengembangkan fitur "Star Wars" yang akan dia sutradarai dan bintang, dan ada juga Shawn Levy masih terikat untuk mengarahkan film "Star Wars" setelah karya lainnya "Deadpool 3".

Profil

Daisy Ridley merupakan aktris kelahiran Westminster, London, Inggris, 10 April 1992.

Memiliki nama lengkap Daisy Jazz Isobel Ridley, ia adalah putri pasangan Louise Fawcner-Corbett dan Chris

AKTRIS asal Inggris Daisy Ridley dipastikan kembali memerankan karakter Rey dalam film baru "Star Wars".

Presiden dari Rumah Produksi Lucasfilm Kathleen Kennedy memastikan kehadiran Daisy Ridley di "Star Wars" terbaru saat mengungkap alur baru untuk seri film tersebut.

Saat acara Star Wars Celebration di London, Kathleen mengungkap seri tersebut akan berfokus pada Rey, yang diperankan Daisy Ridley sejak 2019 lewat "The Rise of Skywalker". Sharmeen Obaid-Chinoy ("Ms. Marvel") dipercaya untuk menyutradarai naskah karya Steven Knight ("Peaky Blinders") untuk film baru "Star Wars" itu.

Film itu mengikuti peristiwa "Rise of Skywalker" dan akan berfokus pada Rey saat dia membangun Jedi Orde





MASALAH KESEHATAN ANAK SELAMA PERJALANAN MUDIK

SELAMA perjalanan mudik, anak akan mengalami perubahan lingkungan dan pola hidup yang berbeda dari kebiasaan sehari-hari, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan mereka.

Satgas Perlindungan Anak IDAI Hari Wahyu Nugroho mengatakan untuk para orang tua untuk tidak memaksakan anaknya ikut bermudik. Apalagi, jika kondisi anak yang semakin menurun saat perjalanan

"Jika anak sedang sakit, baiknya jangan diajak mudik dulu ya. Kalau memang sedang fit, baiknya juga dilakukan transit satu malam," jelasnya dalam Media Briefing Virtual.

Lebih lanjut, Hari mengatakan jika pemudik merasakan kelelahan lebih baik untuk beristirahat di rest area. Hal ini untuk mengantisipasi adanya kecelakaan di saat perjalanan mudik.

"Semua pemudik, baik anak dan orang tua harus makan makanan bergizi ya. Meski sudah adanya pencabutan kebijakan pembatasan, tapi kita harus tetap waspada ya. Kalau ada yang batuk, ya hindari, pakai masker begitu," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Unit Kerja Koordinasi (UKK) Emergensi dan Rawat Intensif Anak (ERIA) Ririe Fachrina Malisie menyarankan untuk semua bisa saling memantau kesehatan keluarga.

"Lingkungan juga harus diperhatikan. Apalagi anak yang masih menggunakan MPASI, maka orang tua harus memastikan makanannya harus terjaga kebersihannya," katanya.

Penyakit yang sering dialami oleh anak dan bayi selama mudik

1. Motion sickness atau mabuk perjalanan

Bayi dan anak-anak lebih rentan mengalami motion sickness karena mereka belum sepenuhnya terbiasa dengan gerakan mobil atau kendaraan yang bergerak.

Gejala motion sickness biasanya meliputi mual, muntah, dan pusing.

2. Dehidrasi

Saat melakukan perjalanan jauh, terutama saat musim panas, anak dan bayi bisa mudah mengalami dehidrasi karena kurang minum atau kehilangan cairan tubuh.

Kondisi ini dapat terjadi pada perjalanan yang panjang, terutama jika suhu di dalam kendaraan atau kapal laut sangat panas.

3. Infeksi saluran pernapasan

Selama perjalanan jauh, anak dan bayi dapat terpapar dengan virus dan bakteri yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan, seperti flu, pilek, atau batuk.

4. Diare

Perubahan pola makan, air minum yang tidak bersih, dan kelelahan dapat menyebabkan anak dan bayi mengalami diare selama perjalanan mudik.

5. Ruam popok

Selama perjalanan jauh, anak dan bayi dapat mengalami ruam popok akibat penggunaan popok yang terlalu lama atau terkena keringat dan kelembapan.

Ririe menjelaskan guna mencegah masalah kesehatan pada anak selama mudik, sebaiknya orang tua memperhatikan kondisi kesehatan anak sebelum dan selama perjalanan, memberikan makanan dan minuman yang sehat dan cukup, serta menjaga kebersihan dan keamanan selama perjalanan.

Selain itu, sebaiknya orang tua juga membawa obat-obatan dan perlengkapan kesehatan yang diperlukan, seperti obat mual, obat demam, atau obat diare, serta peralatan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan atau cedera selama perjalanan.

Dalam perjalanan mudik, banyak faktor yang dapat mempengaruhi keselamatan anak, seperti kondisi jalan yang buruk, cuaca buruk,

atau bahkan perilaku pengemudi yang kurang bertanggung jawab.

Maka, menggunakan car seat, orang tua dapat memperkuat keselamatan anak selama perjalanan dan mengurangi risiko kecelakaan yang mungkin terjadi. (bisnis)



Hyundai Kembangkan Robot Pengisi Daya Mobil Listrik



GRUP Hyundai Motor telah mengembangkan automatic charging robot (ACR) atau robot pengisi daya baterai mobil listrik yang cerdas yang memudahkan pengguna mobil-mobil listrik (electric vehicle/EV) Hyundai dan Kia.

ACR untuk EV adalah robot satu lengan yang mampu menyambungkan kabel ke port pengisian daya EV dan melepaskannya lagi setelah pengisian selesai. Hyundai pun berbagi video mengenai aksi robot itu menindaklanjuti versi CGI yang dirilis oleh grup ini pada Juli tahun lalu.

Video baru dimulai dengan adegan di mana Hyundai IONIQ 6 parkir secara mandiri di tempat pengisian daya EV. Setelah kendaraan diam, ACR berkomunikasi dengan kendaraan untuk membuka port pengisian daya, menghitung lokasi dan sudut yang tepat melalui kamera yang dipasang di dalamnya.

Robot kemudian mengambil

pengisi daya dan mengencangkannya ke port pengisian daya kendaraan, sehingga memulai sesi pengisian daya. Setelah pengisian selesai, robot melepas pengisi daya, mengembalikannya ke tempat yang seharusnya, dan menutup penutup port pengisian kendaraan.

"ACR akan membantu membuat pengisian daya EV menjadi lebih mudah dan nyaman, terutama di lingkungan yang gelap. Ini juga akan meningkatkan aksesibilitas, terutama bagi orang-orang dengan hambatan mobilitas, karena kabel pengisi daya menjadi lebih tebal dan lebih berat untuk memungkinkan pengisian daya berkecepatan tinggi," kata Kepala Lab Robotika Hyundai Motor Group Dong Jin Hyun dikutip dari pernyataan resmi perusahaan, Minggu.

Dong Jin Hyun mengatakan Grup Hyundai akan terus mengembangkan ACR untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan, sehingga semua

pelanggan EV dapat memanfaatkannya di stasiun pengisian daya.

ACR, yang sekilas tampak sederhana, adalah contoh teknologi robot canggih. Lab Robotika Grup Hyundai telah mempertimbangkan beragam variabel dalam mengembangkannya, seperti lokasi parkir kendaraan, bentuk port pengisian daya, cuaca, potensi hambatan, dan berat kabel pengisi daya.

Agar robot dapat memasang pengisi daya ke port pengisian daya dengan aman, diperlukan teknologi perangkat lunak yang dapat secara bersamaan menghitung beberapa variabel ini.

Untuk tujuan ini, Hyundai telah mengembangkan algoritme yang menerapkan teknologi AI berbasis kamera 3D untuk robot, dan teknologi kontrol generasi mendatang ber-

dasarkan aplikasi ini memungkinkan robot menangani pengisi daya berat secara akurat.

Mengingat sebagian besar pengisi daya EV dipasang di luar ruangan tanpa penutup, para insinyur Grup Hyundai membangun stasiun pengisian daya kendaraan listrik luar ruangan yang dipesan lebih dahulu di pusat R&D dan mengevaluasi kinerja dalam berbagai kondisi.

Hasilnya, ACR telah mendapatkan tingkat tahan air dan tahan debu IP651, dan kinerjanya telah sangat ditingkatkan sehingga dapat dioperasikan dengan stabil bahkan di lingkungan yang ekstrem.

Selain itu, para insinyur telah memasang tiang pengamanan dengan sensor laser bawahan di sekitar robot untuk mencegah kemungkinan ke-celakaan dengan memungkinkannya mendeteksi rintangan diam dan bergerak.

Grup mengharapkan robot pengisian otomatis untuk secara signifikan meningkatkan kenyamanan pengisian EV, dan jika digabungkan dengan sistem kontrol parkir otonom di masa mendatang, dapat meningkatkan pemanfaatan dengan mengisi daya beberapa kendaraan yang diparkir secara berurutan. (Ant)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"

PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI



BIRO: SURABAYA: LUTFI YUHANDI | **MOJOKERTO:** RAHMAD SURYADI | **GRESIK-LAMONGAN:** ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | **KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK:** GATOT SUNARKO | **TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI):** IMAN SANTOSO, | **MADIUN:** IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **TRENGGALEK:** ANNGA PRAYOGA

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO | **SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH,

DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, KIKI AMALIA GUYEN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

TIPS MUDIK LEBARAN YANG AMAN

MUDIK menjelang Lebaran sudah menjadi tradisi hingga saat ini. Ada banyak orang yang akan melaksanakan tradisi ini sebagai momentum untuk berkumpul bersama dengan keluarga.

Melansir dari kemenag.go.id, Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama lebaran tahun ini selama tujuh hari yang jatuh pada tanggal 19 - 25 April 2023. Sebelumnya, pemberitahuan cuti bersama ini awalnya ditetapkan pada 21-26 April 2023.

Melihat adanya pemberitahuan tersebut, bagi Anda yang hendak mudik Lebaran, ada baiknya untuk mempersiapkannya jauh-jauh hari. Berikut adalah tips mudik lebaran aman yang dilansir dari berbagai sumber:

1. Cek keadaan rumah sebelum ditinggal mudik

Pastikan bahwa rumah dalam keadaan benar-benar aman untuk ditinggalkan selama Anda mudik Lebaran. Mulai dari mencabut semua kabel aliran listrik, regulator gas, aliran air, serta mengunci semua pintu, jendela, dan pagar rumah.

Penting juga untuk menginformasikan kepada tetangga atau petugas keamanan yang tetap tinggal bahwa rumah Anda dalam keadaan kosong sehingga mereka bisa membantu mengawasi rumah Anda.

2. Persiapkan kesehatan tubuh

Anda perlu memiliki kondisi tubuh yang fit sebelum melakukan

perjalanan jauh. Penting bagi Anda untuk menjaga tubuh Anda dalam keadaan fit sebelum mudik. Mulailah rutin berolahraga, menjaga pola makan, serta mengonsumsi suplemen kesehatan tambahan.

3. Membawa perlengkapan kesehatan

Hal yang tak kalah penting yang perlu dipersiapkan adalah obat-obatan darurat, vitamin serta P3K sepanjang perjalanan. Terutama apabila ada anggota keluarga yang memiliki riwayat penyakit, tentu hal itu perlu diperhatikan agar perjalanan mudik dapat aman dan nyaman.

4. Pastikan juga perbekalan lainnya juga memadai

Bagi Anda yang mudik H-7 Lebaran atau sebagainya, penting untuk membawa perbekalan yang cukup untuk mengatasi dari kemacetan lalu lintas yang ada.

Hal itu diperlukan berhubung Anda melakukan mudik di saat puasa dan Anda membutuhkan perbekalan yang cukup untuk berbuka semisal Anda berbuka puasa di perjalan.

5. Periksa kendaraan yang akan digunakan untuk mudik

Pastikan kendaraan benar-benar dalam keadaan siap untuk dibawa perjalanan jauh. Anda perlu melakukan pengecekan terhadap mesin, rem, oli, hingga ban dan lainnya.

Bila perlu, Anda juga dapat membawa mobil ke bengkel terlebih

dahulu untuk dicek secara profesional. Ada baiknya untuk menyiapkan peralatan di mobil seperti dongkrak, obeng, tang, ban serep, dan untuk berjaga-jaga di keadaan darurat.

6. Persiapkan uang cash

Meski kini banyak yang telah menerapkan sistem cashless, tak ada salahnya untuk selalu membawa sejumlah uang tunai dalam pecahan kecil untuk berjaga-jaga apabila Anda ingin membeli sesuatu di rest area atau lainnya dan di tempat tersebut hanya

bisa menggunakan uang tunai saja.

7. Beli tiket perjalanan jauh-jauh hari

Hal ini diperuntukan bagi Anda yang ingin mudik dengan menggunakan transportasi umum. Pesanlah tiket perjalanan Anda jauh-jauh hari sebelum hari-H perjalanan mudik. Hal ini dilakukan agar Anda tidak kehabisan tiket dan memungkinkan bagi Anda untuk mendapatkan harga yang lebih murah karena tiket perjalanan mudik saat mendekati musim mudik cenderung akan melonjak.

8. Bekali diri dan keluarga dengan asuransi

Agar perjalanan mudik Anda tetap nyaman dan aman, ada baiknya untuk membekali diri dan keluarga dengan produk asuransi, seperti asuransi jiwa atau asuransi kecelakaan. Asuransi akan melindungi dan membantu Anda dalam mengurangi kekhawatiran jika terjadi sesuatu ketika perjalanan mudik, seperti musibah atau bencana alam (bisnis)



Firli di Pusaran (dari hal 1)

PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan pertemuan dengan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan (PNYD) di KPK dari unsur Polri soal polemik pemberhentian Brigadir Endra Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK.

Pertemuan itu dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri Minggu (9/4/2023). Fikri mengatakan ruang diskusi bersama itu digelar pada Selasa, 4 April kemarin.

Fikri menjelaskan pertemuan itu untuk meluruskan dinamika informasi yang berkembang baik di internal maupun eksternal KPK. Selain itu, pertemuan itu juga sebagai lanjutan penjelasan sebelumnya yang telah disampaikan kepada seluruh insan KPK melalui email internal.

"Forum itu dimaksudkan agar pemberantasan korupsi tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, bersama masyarakat guna memberikan kontribusi yang optimal bagi bangsa dan negara," kata Ali Fikri dalam pesan tertulisnya.

Namun Fikri tidak menjelaskan perihal rekaman audio pertemuan antara PNYD dan pimpinan KPK yang disebut berakhir walk out. Ia hanya menjelaskan agar masyarakat tidak terprovokasi dengan narasi pihak tertentu. "Kami meyakini masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi-narasi pihak tertentu terkait dinamika yang terjadi di internal KPK. Karena pemberantasan korupsi adalah ihwal yang utama," kata dia.

Fikri mengatakan KPK akan terus melakukan penguatan soliditas internal dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat agar memastikan pemberantasan korupsi tetap dapat dilakukan bersama.

Sebelumnya, beredar rekaman yang diduga rekaman saat audiensi antara pimpinan KPK dengan pegawai KPK unsur Polri. Rekaman dua bagian itu dibagikan akun Twitter Rakyat Jelata @dimdim0783 pada Ahad. Rekaman itu diduga suara Ketua KPK Firli Bahuri dengan pria diduga bernama Wicklief. Wicklief merupakan Kepala Satgas Penyidikan KPK dari Polri.

Rekaman itu mulai ketika suara diduga Firli selesai menyampaikan pernyataannya. Namun Wicklief tidak puas karena tidak mendapat kejelasan soal status Endra Priantoro. Ia mengatakan mewakili rekan-rekan sesama penyelidik-penyidik Polri meminta agar Endra tetap bertugas di KPK.

"Kami selaku penyelidik berharap Pak Endra tetap sebagai Direktur Penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endra dan Pak Endra tidak boleh dan tidak berkesempatan berdinis lagi di sini, mohon maaf kami selaku junior Bapak, kami mohon maaf sekali Bapak, kami walk out sekarang, kami keluar dari forum ini, ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami, atas perintah Bapak, kami langgar," kata pria diduga Wicklief itu.

Pria diduga Firli pun mencegahnya agar duduk kembali. Ia menjelaskan

pemberhentian Endra bukan masalah pribadi, tetapi berdasarkan keputusan bersama antarpimpinan.

"Silakan duduk, terima kasih," jawab suara diduga Firli.

"Siap, kami izin rekan-rekan..."

"Entar dulu, entar dulu, duduk dulu. Saya tahu Anda, Anda tahu saya. Bukan baru lahir saya. Tadi sudah saya sampaikan keputusan ini bukan keputusan sendiri, paham ya? Paham? Harus dipahami dulu. Ini bukan urusan pribadi, enggak ada. Saya sudah sampaikan bahwa enggak ada sama sekali, tidak ada konflik bagi saya mohon maaf. Saya tidak ada konflik pribadi dengan adik-adik saya. Paham Wicklief?"

"Siap, saya..."

"Itu dulu, itu dulu,"

"Kami balik keluar saja..."

"Nanti dulu dong,"

"Sepertinya tidak ada arahan"

"Bukan...Ini belum selesai!"

"Wicklief?"

"Siap Jenderal!"

"Duduk dulu," kata diduga Firli.

Namun para peserta forum itu terdengar tetap walkout dari ruangan.

Disebut Layak Tersangka

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto atau BW menyebut Firli bahkan sudah bisa menjadi tersangka, bukan sekadar melakukan pelanggaran etik. BW mengatakan bahwa pemberitaan di media dan cuitan yang viral di Twitter, semuanya mengarah kepada dugaan kuat keterlibatan Firli dalam kasus ini.

"Pembocoran dokumen penyelidikan KPK seperti informasi di media maupun cuitan yang beredar di medsos makin mengarah pada dugaan kuat bahwa pelakunya adalah Firli Bahuri, Ketua KPK," kata BW kepada wartawan, Minggu (9/4/2023). "Lebih dari itu, dokumen yang dibocorkan ternyata bukan sekedar Surat Perintah Perintah Penyelidikan tapi punya indikasi kuat menyerupai dokumen Laporan Hasil Penyelidikan," lanjutnya.

BW juga menyoroti pernyataan Wakil Ketua KPK, Alex Marwata yang seolah mengonfirmasi beberapa hal penting. BW juga menduga Alex terlibat dalam kasus dugaan pembocoran dokumen ini. "Pertama Alex, implisit, mengakui adanya pembocoran dokumen; kedua, Alex diduga mendistorsi fakta dan peristiwa karena yang dibocorkan, ternyata, menyerupai Laporan Hasil Penyelidikan bukan sekadar Surat Perintah Penyelidikan KPK; ketiga, pernyataan Alex yang menyatakan pembocoran itu tidak ada dampaknya, sekaligus mengonfirmasi indikasi keterlibatan dirinya atau setidaknya menunjukkan sikap permisifnya," tuturnya.

Lebih lanjut, BW mengatakan bahwa Firli bisa menjadi tersangka jika terbukti membocorkan dokumen tersebut. Firli, kata BW, tidak sekadar melakukan pelanggaran etik. "Jika benar dokumen di atas ditemukan oleh penyelidik KPK di ruang kerja Kabiro Hukum Kementerian ESDM yang diperoleh dari Menteri ESDM, Arifin Tasrif dan berasal dari Firli Bahuri, Ketua KPK, pada kondisi

seperti itu maka Firli sudah dapat dinyatakan sebagai tersangka bukan lagi sekadar pihak yang melakukan pelanggaran etik dan perilaku," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa Alex juga bisa dikualifikasi melakukan kejahatan bersama Firli. "Alex Marwata, salah satu pimpinan KPK lainnya dapat juga dikualifikasi melakukan kejahatan bersama-sama Firli Bahuri karena begitu aktif dan reaktif untuk 'membantu dan melindungi' Firli dari indikasi tindak kejahatannya," ungkapnya.

Ketua KPK Firli Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait isu bocornya dokumen penyelidikan terhadap Kementerian ESDM. Dewas KPK sudah menerima laporan tersebut. Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan pihaknya tengah memproses laporan tersebut. Dia menegaskan pihaknya akan mendalami sesuai aturan yang ada.

"Laporan ada, dan masih diproses sesuai SOP yang berlaku di Dewas," kata Albertina saat dihubungi, Jumat (7/4).

Sebagai informasi, saat ini ada beberapa laporan yang diajukan kepada Dewas KPK terhadap Firli Bahuri. Selain soal dokumen bocor, ada laporan terkait Brigjen Endra Priantoro yang dicopot sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Albertina menegaskan Dewan Pengawas (Dewas) KPK bakal menyelesaikan semua laporan yang ada sesuai aturan yang berlaku. "Semuanya akan diselesaikan sesuai SOP di Dewas," imbuhnya.

Terkait pembocoran data, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikrimengatakan, "Di sisi lain, kami tentu sangat menghargai beberapa pihak yang melaporkan dinamika dan isu dugaan kebocoran dokumen kepada Dewas KPK. Dewas KPK sesuai tugas pokok fungsinya pasti akan menindaklanjuti secara profesional sesuai SOP dan independen dari pengaruh pihak manapun. Kita semua tentu juga menunggu hasil tindak lanjut dari Dewas KPK tersebut."

"Sehingga marilah kita serahkan proses tersebut pada mekanisme di Dewas, sehingga kami berharap tidak ada lagi pihak yang membangun narasi kontraproduktif terkait persoalan dimaksud. Karena hal tersebut justru akan mengganggu stabilitas pemberantasan korupsi di Indonesia," imbuhnya.

Berdampak Negatif ke KPK

Sentimen negatif terhadap Ketua KPK Firli Bahuri menjadi perbincangan di Twitter. Drone Emprit melakukan Social Network Analysis (SNA) pada 1-8 April 2023 soal peta pro-kontra netizen (SNA) tentang Firli dan KPK.

Analisis soal peta ini disampaikan Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, melalui akun Twitternya. "Perbincangan tertinggi di media sosial terjadi pada 8 April 2023 (10.022 mention), didorong desakan pencopotan Firli Bahuri serta "perseteruan" antara Kapolri dengan Firli atas pencopotan Brigjen Endra," kata dia.

Perbincangan tentang Firli Bahuri dan KPK diprediksi masih akan terus

bertahan dalam beberapa hari ke depan," sambungnya.

Ismail Fahmi juga menyampaikan peta media sosial soal Firli dan KPK. Di situ paling besar adalah kluster merah atau negatif yang mayoritas berbicara tentang kontroversi Firli.

Selain itu, Ismail Fahmi juga menyampaikan kesimpulannya dalam analisis tersebut. "Pembahasan tentang Firli Bahuri dan KPK mencapai puncak pada 8 April 2023 dengan sentimen positif hanya 18% dan kontra 77%, terutama disebabkan oleh isu pemecatan Brigjen Endra Priantoro dan dugaan bocoran dokumen korupsi Kementerian ESDM," ujarnya. "Kontroversi yang melanda KPK dianggap sebagai dampak dari revisi UU KPK, dan desakan untuk mencopot Firli dari jabatannya semakin kuat di media sosial dan demonstrasi mahasiswa," tandasnya. (wid,rls,kum,mer,ant/dya)

BEBERAPA CATATAN AKSI KONTROVERSIAL FIRLI BAHURI

1. Terbukti Melanggar Kode Etik Berat

Pada tahun 2019, atau sehari sebelum Firli melakukan fit and proper test oleh Komisi III DPR RI, lembaga antirasuah menyatakan bahwa mantan Deputi Penindakan KPK itu terbukti melanggar kode etik berat. Firli diduga melakukan pertemuan dengan mantan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi (MZM) alias Tuan Guru Bajang (TGB) sebanyak dua kali pertemuan.

2. Ditolak Jadi Ketua KPK

Penolakan terhadap Firli Bahuri menjadi pimpinan KPK sempat masif dinarasikan publik. Bahkan, ICW saat itu menggelar aksi teatrikal di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Tidak hanya ditolak oleh pegiat antikorupsi, ia juga mendapat penolakan langsung dari internal KPK.

3. Menggunakan Helikopter Mewah

ICW menduga Firli Bahuri mendapat diskon dalam penyewaan helikopter yang ditumpanginya itu. Sehingga hal ini dianggap janggal, harus ditelusuri Dewas KPK. Firli dalam perjalanannya ke Baturaja, Sumatera Selatan yang menggunakan helikopter telah dijatuhkan melanggar kode etik oleh Dewas KPK.

4. Bertemu Komisaris PT Pelindo I di Tengah Pengusutan Korupsi

Pertemuan antara Firli dengan Komisaris PT Pelindo I juga menjadi sorotan. Ini karena KPK sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi di Pelindo. Hal ini diketahui setelah akun Instagram milik Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari mendadak ramai setelah mengunggah video Firli Bahuri yang tengah melakukan pertemuan dengan Komisaris Pelindo I Timbo Siahaan.

5. Memanfaatkan Jabatan untuk Cari Popularitas

ICW menduga Firli Bahuri memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk mendapat simpati masyarakat. Pernyataan ini disampaikan peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menyikapi adanya pesan singkat atau SMS terhadap masyarakat yang mengatasnamakan Ketua KPK.

6. Ribut dengan Brigjen Endra Priantoro

Firli Bahuri bersama Sekjen KPK Cahyo Hardianto Harefa dilaporkan ke Dewas KPK oleh Brigjen Pol Endra Priantoro setelah dipecat dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Endra menyebut, pelaporan itu dilayangkan, karena Firli Bahuri tidak menghargai surat penugasan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.



WARGA TERANCAM TERUSIR DARI KAMPUNGNYA WAKIL KETUA DPRD SURABAYA KAWAL KONFLIK TANAH DI MEDOKAN



Foto-foto: istimewa

SURABAYA - Sengkarut kepemilikan tanah di Medokan Semampir Timur atau yang juga dikenal kawasan DAM II dan V B Surabaya, masih terus berlanjut. Bahkan kini warga RT 1 RW 8, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya tersebut makin resah karena terancam terusir dari kampungnya. Pasalnya, salah satu pengembang mengklaim bila lahan yang ditinggali warga sudah diakuisisi. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, AH Thony turun tangan langsung mengawal konflik tersebut dan akan mendampingi warga.

"Warga sudah menempati 22 tahun. Tiba-tiba diusik menjelang Lebaran. Ini persoalan kemanusiaan. Kami ikut perjuangan apa yang menjadi hak warga. Jangan dibenturkan ke persoalan hukum," ujarnya saat menemui warga Medokan Semampir, Jumat (7/4/2023).

Kampung yang dihuni 202 warga ini, selain berupa deretan hunian permanen, juga berupa jalan umum,

balai pertemuan, tempat ibadah, dan fasilitas publik lainnya. Lahan di sempadan sungai tersebut diklaim sudah dalam penguasaan personal salah satu pengembang.

Diungkapkan, bos pengembang itu berdalih mempunyai sertifikat atas tanah dari jual beli. Warga makin resah karena pengembang juga menggugat 77 warga dengan denda sebesar Rp 1,2 miliar. Gugatan itu pun dikabarkan telah diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. "Angka itu cukup besar, apalagi mereka untuk hidup susah. Ini bentuk superioritas atau keangkuhan yang dilakukan mafia tanah tersebut," tegasnya.

Dijadwalkan 3 Mei 2024 mendatang warga akan berhadapan dengan hukum. "Tentu ini makin membuat takut warga. Mereka harus didampingi dan dikuatkan. Inilah sebenarnya tugas pemerintah yang dapat menjamin hidup nyaman warganya," lanjutnya.

Menurut AH Thony, permasalahan warga Medokan Semampir Dam II dan V B harus dicarikan solusi bersama. Apalagi saat ini warga terus-terusan mendapatkan tekanan dari pengusaha besar untuk segera mengosongkan tanah yang telah dihuni sejak 2001 itu. Ia pun tak ingin warga Surabaya menyelesaikan masalah dengan sendiri.

"Warga di situ (Dam II dan VB) juga warga Surabaya, jadi harus mendapatkan perhatian dan harus didampingi karena mereka dibenturkan dengan permasalahan hukum," kata AH Thony, saat dikonfirmasi Minggu (9/4/2023).

Warga juga sudah mengadukan permasalahan tersebut sampai ke Presiden Republik

Indonesia, Joko Widodo, Desember 2021. Sampai dilakukan rapat bersama oleh kantor staf kepresidenan dengan melibatkan empat deputi. Hasilnya warga diperintahkan untuk mengirim surat permohonan pelepasan kepada Gubernur Jawa Timur (Jatim). "Hasilnya tanah itu sudah tidak bermasalah," ujarnya.

Namun menurut AH Thony ada beberapa hal yang harus dipahami, pertama adanya pergeseran sempadan sungai dari 50 meter menjadi 11 meter. Artinya masih tersisa sempadan sungai seluas 39 meter. Pergeseran sempadan itu sesuai Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah Nomor 380 KPTS/M/2004 tentang perubahan batas garis sempadan pada sebagian sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo.

Bahkan ketika ke lokasi AH Thony mengaku sempat melihat patok batas. "Yang saya lihat dari sisa luasan 39 meter itu ada permainan oknum tertentu atau mafia tanah yang ingin menguasai tanah secara pribadi yang sekarang terdapat jalan umum dan hunian warga," jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan alasan pemerintah mengurangi luasan sempadan sungai karena pemerintah mengerti di kawasan pinggir sungai banyak tempat yang dijadikan kegiatan ekonomi. "Harapannya ketika dikurangi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun kenyataannya ada pihak yang kami duga bermain kemudian dikuasai oleh kelompok tertentu," imbuhnya.

AH Thony juga mengkroscek data tanah tersebut melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), di dalam peta tersebut diterangkan bahwa tanah yang sekarang digunakan warga

maupun jalan berwarna ungu, yang artinya merupakan tanah hak pengelolaan (HPL). "Ternyata tanah yang dikotak pada peta yang berwarna ungu adalah hak pengelolaan," ungkap AH Thony.

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Surabaya ini menyampaikan bahwa tanah yang ditempati warga itu, dulunya adalah tanah negara. Lalu dipakai sempadan sungai. Kemudian sejak tahun 2000-an warga sudah bertempat di situ.

"Tahun 2004 terbitlah surat dari keputusan menteri dan maka kelihatannya pihak yang menurut pandangan saya yang lebih berhak memiliki apa memiliki kesempatan untuk mengajukan itu justru warga yang ada di situ," tegasnya. AH Thony berharap agar pemerintah kota segera menerbitkan SPOP, karena ini sudah ada penjelasan bahwa Gubernur memerintahkan untuk kepada Walikota untuk menerbitkan SPOP dan PBB

Sementara itu salah satu masyarakat, Wardoyo mengaku warga selama ini terus diintimidasi oleh oknum yang ingin menguasai tanah itu. Bahkan suatu malam pernah kejadian listrik sengaja dimatikan. "Yang kami ingin selama ini hidup tenang. Tidak ingin diusir dari hunian kami sampai akhir hayat," tegas Wardoyo.

Dia meminta warga untuk tetap satu komando untuk melawan. Jangan sampai terpecah-pecah. Karena menurutnya beberapa warga tengah melepaskan huniannya karena takut terus-terusan terintimidasi. "Apalagi sekarang kami sudah digugat di pengadilan. Jadi saya minta agar warga tidak berleha-leha dan tetap melawan serta waspada," tegasnya. (ADV,mira/dya)

